



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN
2024**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga kami diberi kesempatan untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini.

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sebagai bentuk komitmen dan transparansi atas laporan capaian akuntabilitas kinerja Dinas selama 1 tahun.

Cakupan Laporan kinerja ini meliputi: (1) Pendahuluan yang memuat visi misi organisasi, uraian singkat organisasi, struktur kepegawaian dinas, serta sarana prasarana dinas, (2) Perencanaan Kinerja yang memuat rencana strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama (IKU), serta (3) Akuntabilitas Kinerja yang memuat capaian IKU dan capaian kinerja sasaran, (4) Penutup yang memuat simpulan capaian kinerja sasaran

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ini tentu saja masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Segala saran dan masukan diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel di masa mendatang.

Akhir kata, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman dan memiliki manfaat dalam evaluasi pencapaian kinerja di tahun selanjutnya sehingga ke depannya laporan kinerja dapat lebih terarah.

Makassar, 27 Februari 2025

Kepala Dinas,



Hj. Andi Mina, SH.

Pangkat Pembina Utama Madya

Nip. 19671006 199301 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	5
1.4 Kondisi Kepegawaian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian IKU Tahun 2024.....	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 2024.....	16
Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan)	16
Sasaran 2 (Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)	25
Sasaran 3 (Menurunnya Rata-Rata Angka Total Kelahiran)	42
Sasaran 4 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja).....	48
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	52
3.4 Hasil Evaluasi TL SAKIP 2023/2024	57
BAB IV SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA	58
4.1 Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja	58
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	58
4.3 Rekomendasi/Saran	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.4.1 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	7
1.4.2 Jumlah ASN Menurut Jabatan 2024	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026	10
2.2.1 PK Tahun 2024	11
2.2.2 Indikator Kinerja Utama	12
3. Skala Nilai Perangkat Kinerja	14
3.1.1 Capaian IKU 2024	15
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi 2024 (Sasaran 1)	16
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya (Sasaran 1)	17
3.2.3 Capaian APE Prov. Sulsel	19
3.2.4 Capaian APE Prov. Sulsel tk. Kab/Kota	19
3.2.5 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya	21
3.2.6 Tingkat Efisiensi Sumberdaya (Sasaran 1)	21
3.2.7 Pemenuhan 7 prasyarat PUG	22
3.2.8 Perbandingan Target dan Realisasi 2024 (Sasaran 2)	26
3.2.9 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya	26
3.2.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengsn Target Jangka Menengah Renstra	27
3.2.11 Jumlah korban anak kekerasan yang terlayani 2024	28
3.2.12 Jumlah korban perempuan kekerasan yang terlayani 2024	29
3.2.13 Analisis Atas Efisiensi Sumberdaya (Sasaran 2)	32
3.2.14 Tingkat Efisiensi Sumberdaya (Sasaran 2)	32
3.2.15 Perbandingan Target dan Realisasi (Sasaran 3)	42
3.2.16 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya (Sasaran 3)	43
3.2.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengsn Target Jangka Menengah Renstra	43
3.2.18 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya (Sasaran 3)	45
3.2.19 Tingkat Efisiensi Sumberdaya (Sasaran 3)	46
3.2.20 Perbandingan Target dan Realisasi (Sasaran 4)	48
3.2.21 Komponen Penilaian SAKIP (Sasaran 4)	48
3.2.22 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun Sebelumnya (Sasaran 4)	48
3.2.23 Hasil Evaluasi LHE SAKIP 2023/2024	49
3.2.24 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target RPJMD/Nasional (Sasaran 4)	49
3.2.25 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya (Sasaran 4)	50
3.2.26 Tingkat Efisiensi Sumberdaya (Sasaran 4)	51
3.3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024	52
3.4.1 Hasil Evaluasi Tindak Lanjut SAKIP 2023/2024	57
4.1 Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik 1.4.1 ASN Berdasarkan Golongan	7
Grafik 1.4.2 ASN Berdasarkan Pendidikan	8
Grafik 3.2.1 Perbandingan IDG Provinsi dengan Nasional	17
Grafik 3.2.2 Persentase ARG 2022-2024.....	22
Grafik 3.2.3 Jumlah Korban KtP dan KtA Tahun 2024.....	27
Grafik 3.2.4 Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan UPT.PPA Provinsi Sulsel ...	29
Grafik 3.2.5 Jumlah Pengaduan pada UPT. PPA Provinsi Sulsel.....	30
Grafik 3.2.6 Capaian TFR Sulsel 3 Tahun Terakhir	43
Grafik 3.2.7 Perbandingan Target dan Capaian TFR Nasional dan Provinsi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi DP3A Dalduk KB	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan dan pelaksanaan SAKIP Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja yang bertujuan dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dimana setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan yang memuat pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah, realisasi pencapaian target kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja hingga penjelasan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja akhir tahun 2024 merupakan awal tahun dimulainya dokumen Renstra Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendorong terwujudnya *good governance* di Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 diharapkan mampu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan kinerja berkelanjutan untuk DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Sebagai bahan acuan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan di masa mendatang.
5. Laporan kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* terkait demi perbaikan kinerja DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri atas;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Bidang Perencanaan Keluarga, dan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana

Gambar 1.1
Struktur Organisasi DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel



1.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Perencanaan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris

Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas dibantu oleh tiga Sub bagian, yaitu:

- (1) Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Sub bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah.
- (3) Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Kepala Dinas dibantu oleh dua Bidang Teknis dan satu UPT serta Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak; b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- (2) Bidang Perencanaan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan keluarga; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan keluarga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan keluarga; d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan keluarga; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA)

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020, dengan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

- a. Kepala UPT;

- b. Sub bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Seksi Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut.

Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalahnya lainnya.
2. Subagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPT dalam mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi penyeunana program, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPT.
3. Seksi pengaduan bertugas membantu Kepala UPT dalam pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak
4. Seksi Tindak Lanjut dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan tindak lanjut perlindungan perempuan dan anak.

(4) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Dinas P3A Dalduk KB meliputi :

1. Jabatan Fungsional Arsiparis, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
2. Jabatan Fungsional Pustakawan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan tugas kepastakawanan lainnya.

1.4 KONDISI KEPEGAWAIAN

Dalam kurun waktu tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumberdaya manusia dengan total pegawai ASN sebanyak 57 orang yang membantu Perangkat Daerah mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sumberdaya, yang kemudian dipetakan menjadi beberapa kategori berdasarkan pangkat/golongan, jenis kelamin, pendidikan, serta peta jabatan. Adapun uraiannya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

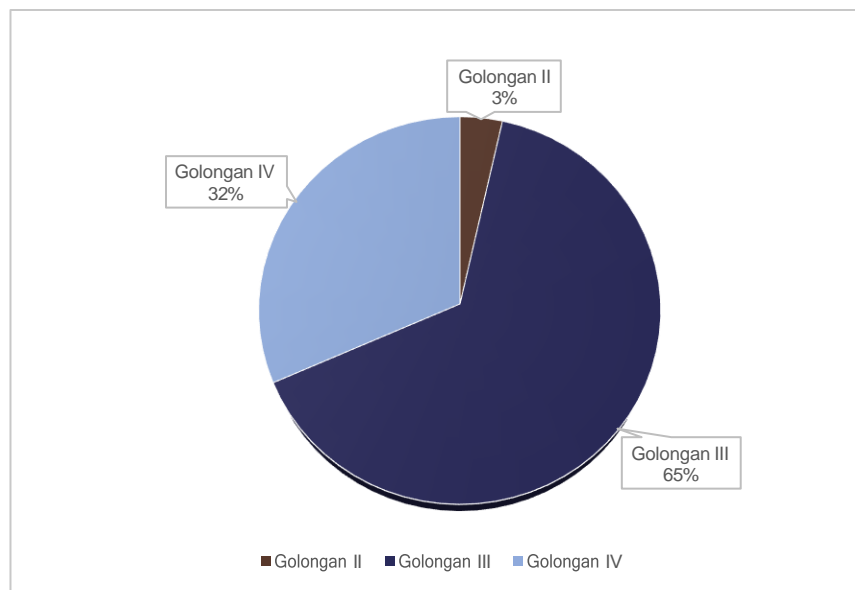
Tabel 1.4.1
Jumlah ASN Menurut Golongan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	2	-	2
3.	Golongan III	11	26	37
4.	Golongan IV	1	17	18
	Total Pegawai	14	43	57

Sumber : Umum DP3A Dalduk KB 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa proporsi pegawai perempuan DP3A Dalduk Kb lebih besar yaitu 75,44 persen. Sedangkan proporsi pegawai laki-laki sebesar 24,56 persen dengan total jumlah pegawai ASN sebanyak 57 pegawai.

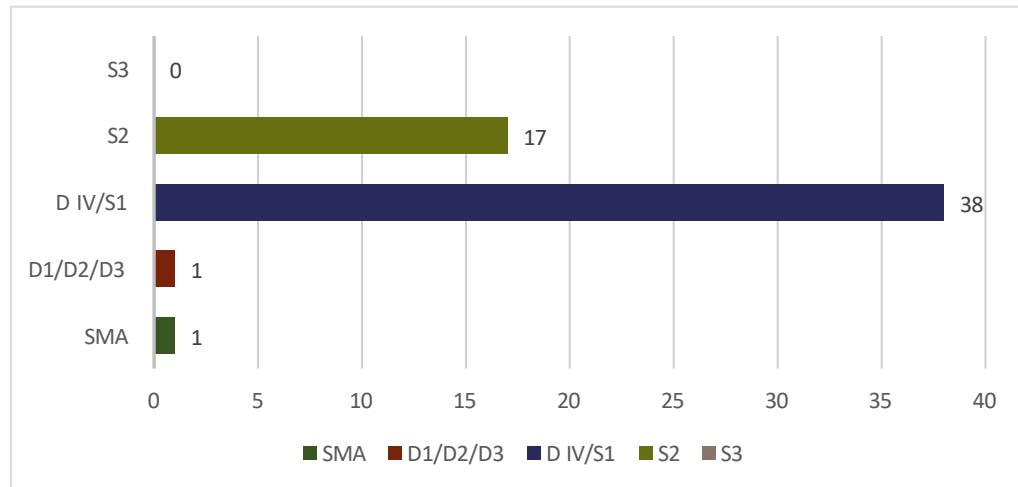
Grafik 1.4.1
Persentase ASN Menurut Golongan Tahun 2024



Sumber : Umum DP3A Dalduk KB 2024

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi pegawai DP3A Dalduk KB Sulsel didominasi oleh golongan III sebesar 65 persen. Sedangkan proporsi pegawai golongan IV sebesar 32 persen dan golongan II sebesar 3 persen dengan perbandingan total jumlah pegawai ASN sebanyak 57 pegawai.

Grafik 1.4.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Sumber : Umum DP3A Dalduk KB 2024

Tabel di bawah ini merupakan kondisi kepegawaian menurut peta jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel Tahun 2024 :

Tabel 1.4.2
Jumlah ASN Menurut Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	6
4.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	3
	Analisis Kebijakan	1
5.	Fungsional Penata Kependudukan dan KB	2
	Fungsional Tertentu	5
5.	Jabatan Pelaksana (Staf)	34
Total Pegawai		57

Sumber : Umum DP3A Dalduk KB 2024

Berdasarkan tabel jumlah ASN menurut jabatan di atas tahun 2024, dapat dilihat bahwa kondisi kepegawaian terdiri oleh jabatan pelaksana sejumlah 33 orang, fungsional penggerak swadaya masyarakat 3 orang, fungsional penata kependudukan dan KB 2, jabatan fungsional tertentu 5 orang, eselon IV 6 orang, eselon III 5 orang serta eselon II dengan total 57 pegawai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, , maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memiliki tujuan “Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk”, dengan indikator tujuan utama : Nilai Indeks Pembangunan Gender, dan Nilai Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Adapun sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sulsel berdasarkan dokumen yang termuat dalam dokumen Renstra 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
2. Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate*
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3A DALDUK KB Prov. Sulsel
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78	74,80	74,82	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78	74,80	74,82
						Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	34,08/ 00000	34,05/ 00000	34,00 00000
							Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,84/ 0000	2,82/ 0000	2,80/ 0000
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.04	1,02	1,00	Menurunnya Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Total Fertility Rate/TFR	2,65	2,64	2,45
							ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	32 Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	30/ Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup	28/ Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	A+	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan PD	Nilai Sakip OPD	A	A	A+

Sumber : Renstra 2024-2026 DP3A Dalduk KB

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan mendukung terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah serta kesepakatan bersama antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tujuan dan fungsi maupun wewenang atas sumber daya manusia yang tersedia. Perjanjian kinerja berisi komitmen yang memuat sasaran, indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulsel Tahun 2024 :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78
2.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/00000)	34.08/100000
		Rasio kekerasan terhadap Anak (/0000)	2,84/10000
3.	Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,65
		ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	30 Kelahiran/1000 Kelahiran Hidup
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan PD	Nilai Sakip OPD	A

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 484.217.000,00	APBD (100%)
2.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 181.258.900,00	APBD (100%)
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.138.514.640,00	APBD (82,86%)
		Rp. 235.480.000,00	DAK NF (17,14%)
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 114.518.200,00	APBD (62,39%)
		Rp. 69.024.000,00	DAK NF (37,61%)
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 969.222.080,00	APBD (100%)
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 645.510.400,00	APBD (100%)

7.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 183.780.900,00	APBD (100%)
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 184.469.300,00	APBD (100%)
10.	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Rp. 2.339.977.000,00	APBD (100%)
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.054.683.774,00	APBD (100%)
	Total	Rp. 18.600.656.194	

Sumber : PK 2024, DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Cara Menghitung	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	$\frac{I(par)+I(DM+I(Inc-dis))}{3} \times 100\%$ Ket : I(par) : Indeks keterwakilan di parlemen I(DM) : Indeks pengambil keputusan I(inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan	BPS
2	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000)	Ratio KtP/00000	$\frac{Jumlah\ korban\ kekerasan\ perempuan}{Jumlah\ penduduk\ perempuan < 18\ tahun}$	Simfoni PPPA
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak (per 10.000)	Ratio KtA/0000	$\frac{Jumlah\ korban\ kekerasan\ anak}{Jumlah\ penduduk\ anak < 18th} \times 10.000$	Simfoni PPPA
3	Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total/TFR	Nilai TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	$\frac{Jumlah\ Kelahiran}{Jumlah\ populasi\ penduduk} \times 100\%$	BPS/ BKKBN
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Nilai	$ASFR = \frac{bi}{pi} \times k$	BKKBN

				Ket : b_i : jumlah kelahiran dari perempuan dari kelompok umur i f_i : jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur i k : konstanta = 1000	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian Inspektorat	Inspektorat

Sumber : IKU DP3ADALDUK KB Prov. Sulsel

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan laporan kinerja merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, menyajikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta pencapaian program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan organisasi.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran berdasarkan 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realiasi Kinerja
1.	>91%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	<50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Untuk perhitungan persentase capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi yang dibagi dalam kondisi di bawah ini :

- 1) Indikator dengan capaian positif yang dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dengan menggunakan formula :

$$\text{Persentase capaian kinerja (meningkat)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100 \%$$

- 2) Indikator negatif yang dimana semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja suatu indikator dengan menggunakan formula :

$$\text{Persentase capaian kinerja (menurun)} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka berikut capaian kinerja tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas realisasi dan persentase capaiannya.

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78	75,25	100,63
2.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/00000)	34,08	21,33	137,41
		Rasio kekerasan terhadap Anak (/0000)	2,84	3,67	70,77
3.	Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR))	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,65	2,15	118,87%
		ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	30	26,4	112%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan PD	Nilai Sakip OPD	A	A (81,25)	81,25%

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1

Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan

Sasaran strategis yang pertama pada DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan” yang mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Sulawesi Selatan yaitu : ***Tujuan (3) : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata dengan sasaran strategis : Meningkatkan Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.*** yang diukur melalui Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender).

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,78	75,25	100,63	ST

(Sumber : BPS, 2024)

Salah satu penjabaran dari tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata adalah meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Indeks Pemberdayaan Gender sendiri menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur bagaimana bentuk kesetaraan gender dalam pembangunan. Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pada sasaran strategis (1) dengan indikator kinerja Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) berada dalam kategori sangat tinggi (ST) dengan realisasi 75,25 dan persentase capaian sebesar 100,63%. Capaian tersebut masih naik 0,1 poin dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) sendiri didapatkan melalui 3 komposit pembentuk IDG yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan di tingkat parlemen, keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan. Berdasarkan data di atas, nilai IDG ((Indeks Pemberdayaan Gender) tahun 2024 adalah 75,25. Hal ini berarti bahwa perempuan cukup memainkan peran aktif dalam ekonomi dan politik melalui sumbangsih pendapatan perempuan dalam bidang ekonomi serta partisipasi aktif perempuan dalam parlemen. Kesetaraan gender di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri diharapkan terus menunjukkan tren positif dengan lebih memberikan kesempatan, ruang dan akses yang lebih kepada kaum perempuan dalam pembangunan seperti meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang kewirausahaan untuk mendukung sumbangan pendapatan perempuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

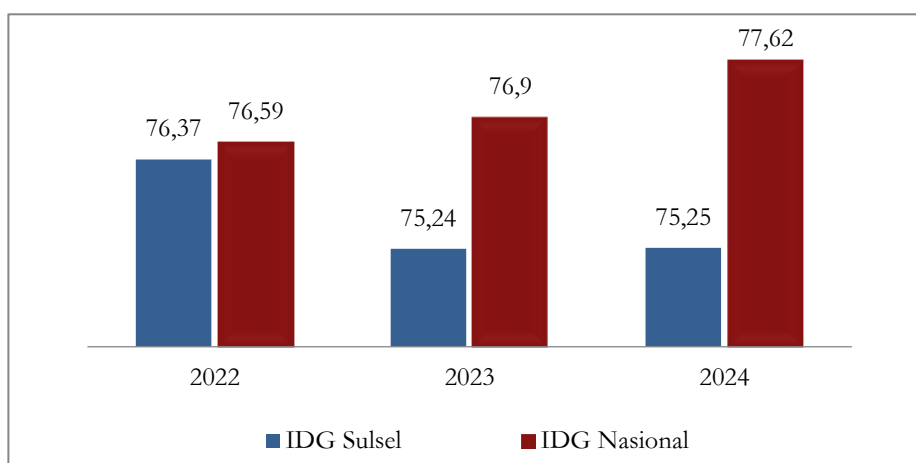
Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2022	2023	2024
1.	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	76,37	75,24	75,25

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sulsel 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tren IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2023 nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan poin sebesar 1,13 dari tahun sebelumnya, namun naik hanya 0,1 poin di tahun 2024 menjadi 75,25. Kenaikan yang tidak signifikan tersebut pada tahun 2024 disebabkan oleh indikator komposit pembentuk IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan. Indikator Indeks keterwakilan perempuan di parlemen kembali menurun di tahun 2024 menjadi 25,00 persen yang sebelumnya 25,88 persen. Di sisi lain, indikator sumbangan pendapatan perempuan mengalami peningkatan menjadi 32,73 persen naik sebesar 0,32 poin dari tahun sebelumnya. Kisaran angka 30 persen masih mendominasi untuk sumbangan pendapatan perempuan yang berarti masih terdapat kesenjangan dalam bidang ekonomi yang meliputi ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena kecenderungan perempuan yang sering menjadi pekerja yang tidak dibayar. Selain itu, peran lembaga pemberdayaan perempuan juga sangat penting dalam meningkatkan kontribusi pendapatan perempuan. Selain itu, proporsi perempuan sebagai tenaga profesional juga mengalami kenaikan menjadi 55,10 persen di tahun 2024. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional

Grafik 3.2.1
Perbandingan Realisasi IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi dengan Nasional Tahun 2022-2024



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tren IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Nasional mengalami peningkatan yang konsisten selama 3 tahun terakhir (2022-2024). Namun, nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Provinsi Sulawesi Selatan capaiannya mengalami penurunan yang disebabkan oleh salah satu dimensi pembentuk nilai IDG yang tergolong masih rendah. Oleh karena itu, peran DP3A Dalduk KB dibutuhkan dalam berkontribusi capaian kinerja IDG di Sulawesi Selatan melalui peningkatan standarisasi lembaga pemberdayaan perempuan yang diharapkan mampu berkontribusi sumbangan pendapatan perempuan, serta meningkatkan kapasitas, peran serta partisipasi perempuan baik itu caleg (calon legislatif) maupun aleg (anggota legislatif) di parlemen.

c. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja :

Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kementerian PPPA sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Salah satunya adalah memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Provinsi dan kabupaten/kota. Penghargaan ini berupa suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai untuk menunjukkan konsistensi dalam penerapan prasyarat PUG (Pengarusutamaan Gender).

Sejak akhir tahun 2021 telah dilakukan revitalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender) terkait pelembagaan dan penyelenggaraan PUG. Untuk pelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang semula terdapat 7 prasyarat yang terdiri dari (Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya dan Anggaran, Data dan Sistem Informasi, Alat (*Tools*) dan Partisipasi Masyarakat yang direvisi menjadi 3 prasyarat yaitu Landasan Hukum, Lembaga : Sumber Daya Manusia dan Internalisasi PUG dan Data Terpilah. Sedangkan untuk penyelenggaraan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang semula Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan (sebagian) dan Evaluasi (Kelembagaan) menjadi Perencanaan (revisi), Penganggaran (revisi), Pelaksanaan (seluruh), Pemantauan, Evaluasi (seluruh), Pengawasan dan Pelaporan.

Selanjutnya, inovasi terkait pelembagaan dan penyelenggaraan PUG dilakukan melalui pemberian penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) menurut kategori. Adapun peran DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pelembagaan dan penyelenggaraan PUG adalah melakukan evaluasi mandiri melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota melalui penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya).

Evaluasi penyelenggaraan PUG di K/L dan daerah dilakukan setiap tahun namun penyelenggaraan penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) dilakukan setiap 2 tahun. Untuk tahun 2024, penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Provinsi Sulawesi Selatan masih meraih kategori

Nindya. Adapun capaian APE Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari dari pencapaian kategori APE di 24 kab/kota yang telah memenuhi prasyarat PUG (Pengarusutaman Gender). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.3
Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Prov. Sulawesi Selatan

No.	Tahun	Kategori
2.	2021	Mentor
3.	2023	Nindya
4.	2024	Nindya

(Sumber : KemenPPPA 2024)

Tabel. 3.2.4
Pencapaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Tahun 2021 dan 2023 tingkat Kab/Kota

No.	Kab/Kota	Kategori APE	
		2021	2023
1.	Makassar	Utama	Nindya
2.	Maros	Utama	Madya
3.	Bone	Utama	Madya
4.	Sinjai	Utama	Madya
5.	Luwu Timur	Utama	Madya
6.	Pangkep	Madya	Madya
7.	Bulukumba	Utama	Pratama
8.	Pare-Pare	Utama	Pratama
9.	Bantaeng	Madya	Pratama
10.	Wajo	Madya	Pratama
11.	Soppeng	Madya	Pratama
12.	Luwu	Madya	Pratama
13.	Luwu Utara	Madya	Pratama
14.	Palopo	Madya	Pratama
15.	Enrekang	Pratama	Pratama
16.	Barru	-	Pratama
17.	Selayar	Pratama	Pratama
18.	Sidrap	Pratama	-
19.	Jeneponto	Madya	-
20.	Takalar	Madya	-
21.	Gowa	Madya	-
22.	Pinrang	-	-
23.	Toraja	-	-
24.	Toraja Utara	-	-
	Provinsi Sulawesi Selatan	Madya	Nindya

(Sumber : KemenPPPA 2024)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya di tahun 2024 mengalami penurunan ke kategori Nindya. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses mutasi yg intens pada level Kasubag Program dan Bidang teknis di masing-masing Perangkat Daerah sehingga koordinasi pokja *focal point* stagnan dan lambat.
2. Minimnya SDM yang bersertifikasi sebagai fasilitator PUG dan paham terkait pelaksanaan PUG sehingga proses pendampingan/*mentoring* PUG ke kab/kota dan perangkat daerah tingkat Provinsi tidak berjalan secara maksimal.
3. Komitmen Tim driver Pokja PUG dalam hal ini Bappelitbangda, BKAD dan inspektorat belum maksimal dalam mendorong penyelenggaraan PUG sehingga dinas DP3A terkesan bekerja sendiri.
4. Refocusing anggaran pada sub kegiatan yang berkaitan dengan Kesetaraan Gender sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi ke kab/kota, penguatan PUG bagi tim focal point, koordinasi ke LM dan media massa tidak bisa terlaksana secara maksimal.
5. Forum Puspa tidak berjalan sehingga peran LPLPP tdk terdata dan terdokumentasi dgn baik.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dan penyebab adanya penurunan kinerja adalah :

- Keterlibatan partisipasi perempuan di tingkat parlemen yang masih tergolong rendah sebesar 25,88%* (kondisi tahun 2023), sehingga belum bisa memenuhi kuota *affirmative action* sebesar 30%. Hal ini disebabkan karena jumlah legislator perempuan yang masih rendah di kursi parlemen.
- Kondisi status pekerjaan perempuan yang cenderung lebih banyak bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar sehingga sumbangsih pendapatan perempuan masih rendah.
- Proses standarisasi lembaga pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi tidak berjalan secara optimal dan maksimal sehingga lembaga pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi masih sangat sedikit dan dampaknya terhadap kontribusi sumbangan pendapatan perempuan dan keterlibatan perempuan di tingkat parlemen.
- Efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun 2024 yang menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak berjalan secara optimal bahkan tidak dilaksanakan.

Upaya/Rekomendasi yang dapat dilakukan :

- Penguatan komitmen daerah melalui kebijakan yang responsif gender terkait penyelenggaraan Pengarusutaman Gender di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Melakukan standarisasi terhadap lembaga pemberdayaan perempuan yang belum terstandarisasi sebagai upaya dalam mendukung peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
- Perlunya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan kapasitas di bidang sosial, hukum dan politik dalam mendukung keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan dan keterwakilan di tingkat parlemen.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target kinerja sasaran dinas (1), terdapat 2 program yang mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu : Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan total anggaran sebesar Rp. 520.190.900 dengan realisasi sebesar Rp. 473.299.900 atau 90,98 persen serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan total anggaran Rp. 76.518.000 dengan realisasi sebesar Rp. 47.471.330 atau 62,03 persen.

Tabel 3.2.5
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024

No.	Program	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1.	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 520.190.900	Rp. 473.299.900	90,98
2.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 76.518.000	Rp. 47.471.330	62,03
Jumlah		Rp. 596.708.900	Rp. 520.771.230	87,27

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sulsel membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran program yang mendukung sasaran tersebut. Sasaran kinerja DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan (1) yaitu “meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan” yang didukung oleh 2 program yaitu : (Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak). Adapun perhitungan tingkat efisiensinya tergambar pada tabel di bawah ini :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja Sasaran (1)} - \text{Capaian RA Program}}{\text{Capaian RA Program}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{100,63 - 87,27}{87,27} \times 100\% = 15,31\%$$

Tabel 3.2.6
Tingkat Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	Program Mendukung Sasaran	%Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG	100,63	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender	87,27%	15,31%

e. **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

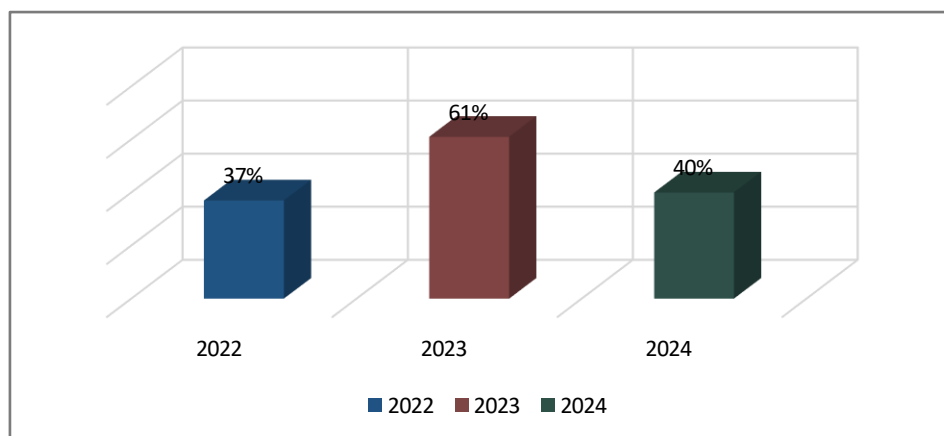
- Pada program pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2024 didukung oleh 3 target indikator kinerja yaitu 1). Pencapaian ARG (Anggaran Responsif Gender) Provinsi Sulawesi Selatan, 2). Pemenuhan indikator prasyarat PUG di tingkat Provinsi dan 3). Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi. Untuk capaian ARG (Anggaran Responsif Gender) di tahun 2024 sebesar 40%. Adapun perhitungan Anggaran Responsif Gender merupakan anggaran program/kegiatan yang dipetakan oleh perangkat daerah dengan jumlah anggaran yang responsif gender.

- Belanja Operasi (Barang, Hibah, Bansos) : Rp. 3.001.135.870.610

- Belanja Modal : Rp. 1.194.371.871.731

Adapun persentase pencapaian ARG (Anggaran Responsif Gender) tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini :

Grafik 3.2.2
Persentase Pencapaian ARG di tingkat Provinsi



Tabel 3.2.7
Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG di tingkat Provinsi

No.	Indikator	2022	2023	2024
1.	Pemenuhan indikator prasyarat PUG di tingkat Provinsi	NA	70%	71%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan indikator prasyarat PUG di tingkat Provinsi pada tahun 2024 sebesar 71 persen, yang berarti bahwa sebesar 71 persen Perangkat Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar kegiatannya telah responsif gender.

Untuk capaian kegiatan yang menunjang pada program pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :

- Untuk mendukung pencapaian pengarusutaman gender di Sulawesi Selatan, telah dilakukan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi meliputi sosialisasi PUG (Pengarusutaman Gender) melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 474-24/4124/DP3A DALDUK KB untuk percepatan penyelenggaraan PUG (Pengarusutaman

Gender) bagi Perangkat Daerah Provinsi dan percepatan penyelenggaraan PUG (Pengarusutaman Gender) bagi 24 kabupaten/kota. Adapun proses pendampingan/mentoring PUG (Pengarusutaman Gender) ke kabupaten/kota sebagian besar dilakukan secara daring karena adanya efisiensi anggaran.

- Melaksanakan penguatan pelembagaan PUG (Pengarusutaman Gender) dan data terpilah gender bagi kabupaten/kota.
- Telah dilaksanakan rapat konsolidasi PUG (Pengarusutaman Gender), Pemberdayaan Perempuan dan Sistem Data Gender dan Anak tingkat kab/kota yang membahas terkait revitalisasi Pengarusutaman Gender sebagai komponen Penilaian Parahita Ekapraya (PPE) dengan peserta dari 24 kab/kota.
- Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG (Pengarusutaman Gender) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2028 dengan peserta dari perangkat daerah tingkat Provinsi dan beberapa organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.



- Pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi tahun 2024, telah dilaksanakan *workshop* peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan dalam bidang sosial dan peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan di bidang sosial.





- Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 3 LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) telah terstandarisasi di tingkat Provinsi yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Indonesia Maju, dan Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan.
- Perkembangan *website* SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Tingkat Kab/Kota Tahun 2023 dimana 18 atau sebesar 80% Kab/Kota telah menyediakan kelembagaan Sistem Data Gender dan Anak *terupdate* secara mandiri.

Sasaran perangkat daerah pada DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan” mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Sulawesi Selatan yaitu : ***Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata dengan sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.*** yang diukur melalui Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak (KtA).

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dari segi verbal maupun non-verbal semakin menjadi isu menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kesenjangan terhadap perempuan seringkali disebut sebagai kekerasan berbasis gender, karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat. Kekerasan terhadap anak pula menjadi perhatian di masyarakat karena masih terdapat beberapa keluarga yang menganggap kekerasan merupakan sebuah didikan bagi anak itu sendiri. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat merugikan aspek-aspek kesejahteraan fisik dan mental-emosional. Selain itu, Kekerasan terhadap perempuan juga kalau kita cermati beresiko jangka panjang untuk terjadinya gangguan mental dan kesehatan korban.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian serius, terlebih dengan adanya tuntutan ekonomi yang semakin memperluas jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya dalam pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, harus dijalankan fungsi koordinasi, advokasi, fasilitasi dan sinkronisasi serta monitoring terkait pelaksanaan kegiatan secara terpadu dengan lintas sektor lain. Namun, yang menjadi tantangan adalah tingkat pendidikan yang masih rendah dan kemiskinan yang masih tinggi sehingga menimbulkan pemahaman yang belum utuh terkait perkawinan anak dan diskriminasi gender yang merendahkan martabat perempuan. Selain itu, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilakukan penguatan terhadap Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk meminimalisir praktek *human trafficking* serta mengantisipasi praktek pemalsuan identitas. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan serta media juga berperan. Komitmen perangkat daerah serta lintas sektoral juga sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.2.8
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) (/100.000)	34,08/100.000	21,33/100.000	137,41	ST
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (KtA) (/10.000)	2,84/10.000	3,67/10.000	70,77	C

Sumber : Data Simfoni, 2024

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi di atas, dapat dilihat bahwa rasio kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 sebesar 21,33 per 100.000 yang berarti bahwa penurunan rasio angka kekerasan terhadap perempuan sudah lebih baik daripada target 2024 dengan persentase capaian sebesar 137,41 persen. Adapun jumlah korban kekerasan terhadap perempuan untuk tahun 2024 sebanyak 1017 korban. Namun, untuk rasio kekerasan terhadap anak ternyata belum melampaui target 2024 dengan rasio 3,67 per 10.000 korban dengan total korban kekerasan terhadap anak sebesar 1057 korban.

Untuk formulasi perhitungan capaian realisasi terkait rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah korban kekerasan thd perempuan}}{\text{Jumlah perempuan}} \times 100.000$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah korban kekerasan thd anak}}{\text{Jumlah anak < 18 tahun}} \times 10.000$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

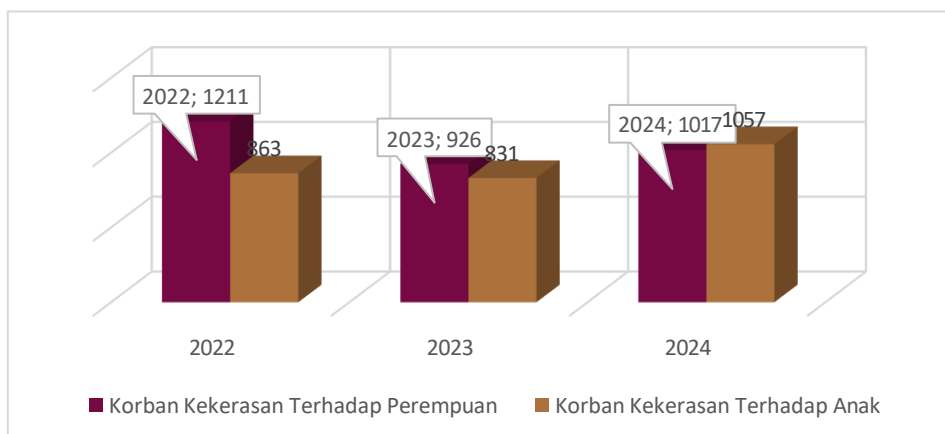
Tabel 3.2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2022	2023	2024
1.	Rasio kekerasan terhadap perempuan (KtP) per 100.000	26,32/100.000	19,66/100.000	21,33/100.000
2.	Rasio kekerasan terhadap anak (KtA) per 10.000	2,83/10.000	2,72/10.000	3,67/10.000

(Sumber : Data Simfoni, 2024)

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja di atas dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa rasio penurunan kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2022 hingga 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan secara rata-rata menunjukkan tren penurunan namun belum konsisten dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak juga menunjukkan tren penurunan namun meningkat di tahun 2024.

Grafik 3.2.3
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2022-2024



(Sumber : Data Simfoni, 2024)

Sedangkan rasio kekerasan terhadap anak juga mengalami tren penurunan yang cukup konsisten dari tahun 2022 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan dimana jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masing-masing sebanyak 1017 dan 1057 korban. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap capaian rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sulawesi Selatan komitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan seperti memaksimalkan peran UPT.PPA Provinsi dan kab/kota, melakukan standarisasi lembaga perlindungan perempuan dan anak, penguatan di tingkat pencegahan, peningkatan kapasitas bagi tim pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta layanan penjangkauan dan pendampingan secara langsung terhadap korban kekerasan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target 2025	Target Akhir	Capaian s/d 2024 Terhadap Target 2026
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)			
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	34,04/00000	21,33/00000	137,99	34,02/00000	34,00/00000	21,33/00000
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	2,82/00000	3,67/00000	70	2,80/00000	2,78/00000	3,67/00000

(Sumber : Renstra DP3A Dalduk KB, Simfoni 2024)

Merujuk pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan telah melebihi target 2024 namun untuk rasio kekerasan terhadap anak belum melampaui target. Sehingga untuk target rasio kekerasan terhadap perempuan di tahun 2025 dan akhir tahun 2026 masing-masing sebesar 34,04/00000 dan 2,78/0000. Selanjutnya, rasio kekerasan terhadap anak targetnya 2,80/0000 dan 2,78/0000 untuk tahun 2025 dan 2026.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja :

- Peran lembaga perlindungan perempuan dan anak pada UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu indikator yang diukur secara langsung berdampak terhadap pencapaian kinerja menurunnya rasio kekerasan perempuan dan anak melalui pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Untuk tahun 2024, jumlah korban kekerasan yang terlayani pada UPT. PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.11
Jumlah Korban Anak yang Terlayani di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kab/Kota	Penduduk Anak	Korban Anak	Rasio Korban (Per 10.000 Penduduk)	Korban Anak yang Dilayani
1	Selayar	41.219	6	1,4556394	6
2	Bulukumba	132.218	33	2,495878	33
3	Bantaeng	61.660	31	5,0275705	31
4	Jeneponto	136.346	27	1,9802561	27
5	Takalar	102.845	16	1,5557392	16
6	Gowa	238.378	59	2,4750606	59
7	Sinjai	80.437	20	2,4864179	20
8	Maros	128.684	63	4,8957135	63
9	Pangkep	115.848	30	2,5896002	30
10	Barru	57.168	17	2,9736916	17
11	Bone	233.416	39	1,6708366	39
12	Soppeng	59.184	32	5,4068667	32
13	Wajo	114.967	60	5,2188889	60
14	Sidrap	99.240	16	1,6122531	16
15	Pinrang	127.861	14	1,094939	14
16	Enrekang	71.349	30	4,204684	30
17	Luwu	121.198	27	2,2277595	27
18	Toraja	81.153	29	3,573497	29
19	Luwu Utara	104.662	29	2,7708242	29
20	Luwu Timur	101.553	22	2,1663565	22
21	Toraja Utara	90.527	22	2,4302142	22
22	Kota Makassar	463.765	350	7,5469257	350
23	Kota Parepare	52.754	40	7,5823634	40
24	Kota Palopo	59.224	45	7,598271	45
Jumlah		2.875.656	1057	3,675683	1057

Sumber : Simfoni PPA

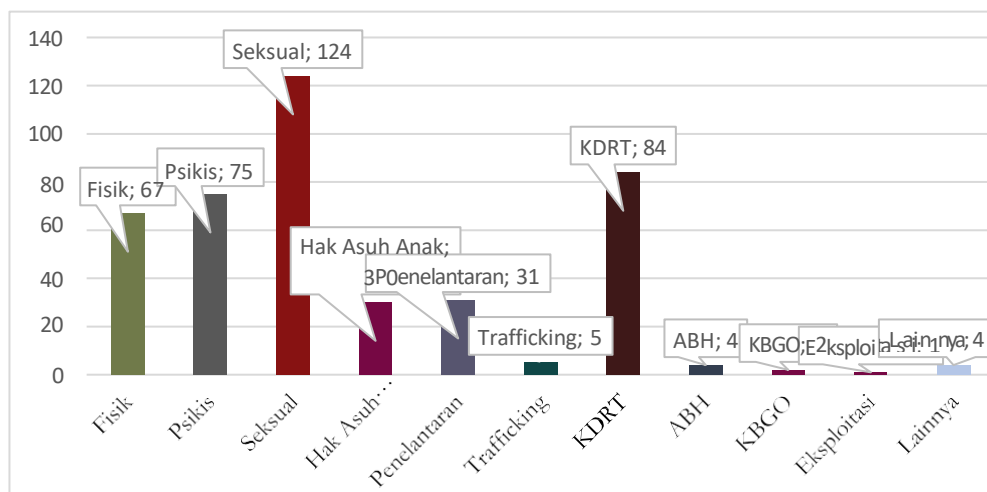
Tabel 3.2.12
Jumlah Korban Perempuan yang Terlayani di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Penduduk Perempuan	Korban Perempuan	Rasio Korban (Per 100.000 Penduduk)	Korban yang Dilayani
1	Selayar	72.379	7	9,671314	7
2	Bulukumba	242.941	26	10,702187	26
3	Bantaeng	108.150	26	24,040684	26
4	Jeneponto	213.774	27	12,630161	27
5	Takalar	168.506	4	2,373803	4
6	Gowa	407.383	56	13,746278	56
7	Sinjai	138.357	40	28,910716	40
8	Maros	202.988	65	32,021597	65
9	Pangkep	183.134	27	14,743303	27
10	Barro	99.379	16	16,099981	16
11	Bone	420.943	46	10,927845	46
12	Soppeng	124.605	28	22,471008	28
13	Wajo	210.780	54	25,619129	54
14	Sidrap	167.030	14	8,381728	14
15	Pinrang	213.056	17	7,979123	17
16	Enrekang	114.535	23	20,081198	23
17	Luwu	190.107	24	12,624469	24
18	Toraja	125.649	23	18,304961	23
19	Luwu Utara	165.514	37	22,354604	37
20	Luwu Timur	152.910	16	10,463671	16
21	Toraja Utara	129.404	17	13,137152	17
22	Kota Makassar	743.853	293	39,389503	293
23	Kota Parepare	81.209	67	82,503171	67
24	Kota Palopo	90.241	64	70,9212	64
Jumlah		4.766.827	1017	21,33	1017

Sumber : Simfoni PPA

- Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak melalui UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami : fisik, hak asuh anak, KDRT, eksploitasi, psikis, penelantaran, ABH (Anak Berhadapan Hukum), seksual, trafficking, KBGO dan jenis kekerasan lainnya. Selama tahun 2024, jumlah kekerasan tahun 2024 berdasarkan jenis kekerasan yang terlayani pada UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

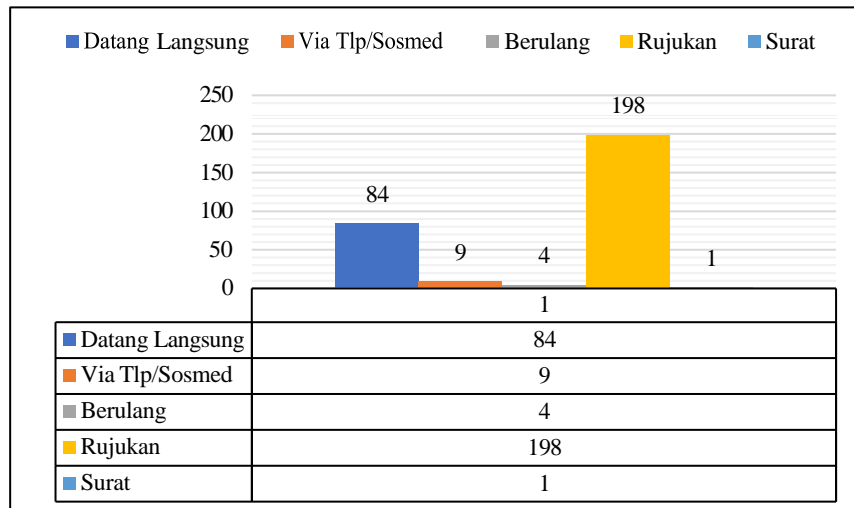
Grafik 3.2.4
Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2024



Sumber : UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Berdasarkan grafik jumlah kekerasan berdasarkan jenis kekerasan tahun 2024 di atas bahwa total jumlah kekerasan yang terlapor dan terlayani pada UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2024 adalah 427 korban kekerasan yang didominasi oleh kekerasan jenis seksual sebanyak 124 korban.

Grafik 3.2.5
Jumlah Pengaduan Korban pada UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024



Sumber : UPA. PPA Provinsi Sulawesi Selatan 2024

- Berbagai upaya pencegahan kekerasan telah dilakukan salah satunya dengan kolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan seperti UNICEF, USAID, dan LSM pemerhati perempuan dan Anak untuk melakukan pencegahan kekerasan. Sebagai contoh, telah dilakukan upaya melalui program BERANI II untuk pencegahan kekerasan anak pencegahan perkawinan usia anak.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja dan permasalahan yang dihadapi adalah :

- Permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor namun kapasitas sumber daya manusia yang terbatas sehingga petugas layanan khususnya yang akan bersentuhan langsung dengan korban kekerasan perempuan dan anak, belum cukup terlatih untuk lebih responsif terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah terbentuk belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga masih terdapat UPT.PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di kabupaten/kota yang terbatas tidak hanya sumber daya manusia terampilnya tetapi juga sarana prasarana.
- Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu di sosialisasikan dan masih perlu melakukan koordinasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan guna meningkatkan pelayanan yang komprehensif kepada korban kekerasan

- Efisiensi anggaran yang membuat cakupan penjangkauan bahkan pemulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dilakukan secara maksimal
- Masih kurangnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Sumber Daya Manusia (SDM) terampil yang terbatas.

Upaya/Rekomendasi yang dapat dilakukan :

- Adanya kesesuaian perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
- Koordinasi lintas sektor dalam upaya mendukung proses standarisasi lembaga perlindungan perempuan dan anak yang didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai.
- Melakukan standarisasi terhadap lembaga perlindungan perempuan dan anak yang salah satunya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil dan penyediaan sarana prasarana
- Penguatan kapasitas fasilitator pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta penguatan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala
- Terkait urusan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya dilakukan kerjasama lintas sektor antar lembaga terkait sehingga terbentuk kebijakan dan aksi yang lebih maksimal yang mendukung penurunan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja dengan target sasaran terkait penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak didukung melalui pencapaian 4 program diantaranya : 1). Program Perlindungan Perempuan dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 1.071.970.140 dengan realisasi sebanyak Rp. 988.301.703 atau 92,19 persen. 2). Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan jumlah anggaran Rp. 841.557.280 dengan realisasi sebanyak Rp. 834.494.280 atau 99,16 persen. 3). Program Pemenuhan Hak Anak sejumlah Rp. 556.644.500 dengan realisasi sebanyak Rp. 541.098.927 atau 97,21 persen. 4). Program Perlindungan Khusus Anak Rp. 113.206.400 dengan realisasi Rp. 103.620.054 atau 91,53 persen. Adapun jumlah anggaran efisiensi sumber daya dari keempat program yang mendukung sasaran menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Rp. 2.583.378.320 dengan realisasi Rp. 2.467.514.964 dan persentase sebesar 95,02 persen. Adapun tabel analisis atas efisiensi sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.13
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

No.	Program	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.071.970.140	Rp. 988.301.703	92,19
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 841.557.280	Rp. 834.494.280	99,16
3.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 556.644.500	Rp. 541.098.927	97,21
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 113.206.400	Rp. 103.620.054	91,53
Jumlah		Rp. 2.583.378.320	Rp. 2.467.514.964	95,02

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran program yang mendukung sasaran tersebut. Sasaran strategis yang mendukung keempat program di atas yaitu menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pencapaian kinerjanya seperti yang termuat dalam tabel di atas. Adapun perhitungan tingkat efisiensinya sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Kinerja Sasaran (2)} - \text{Persentase Realisasi Anggaran Program}}{\text{Capaian RA Program}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{104,09 - 95,02}{95,02} \times 100\% = 9,54\%$$

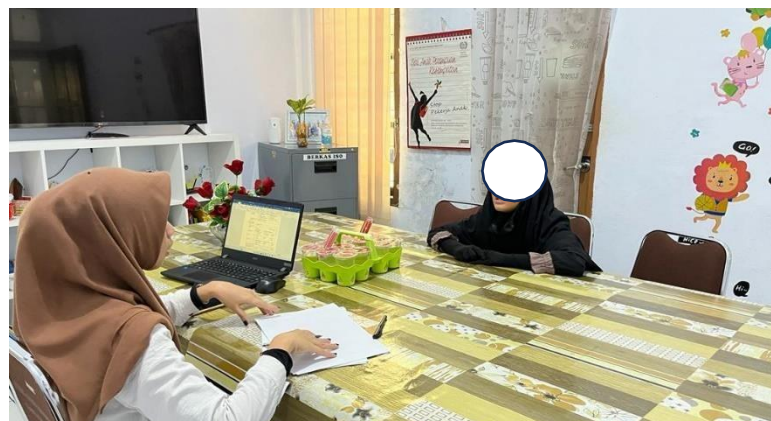
Tabel 3.2.14
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	Program Mendukung Sasaran	%Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (/00000) Rasio Kekerasan Terhadap Anak (/0000)	137,41 70,77	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Perlindungan Khusus Anak 	95,02%	9,54-

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa aspek yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah dilaksanakan sinergitas program dan kegiatan yaitu:

- Pencapaian program perlindungan perempuan, telah terbentuk lembaga layanan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT.PPA) sebesar 91,6 persen atau sebanyak 22 kab/kota namun belum seluruhnya terstandarisasi. Adapun cakupan persentase korban kekerasan yang terlayani adalah 95 persen.
- Sebanyak 24 kabupaten/kota telah membentuk Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam rangka peningkatan kualitas keluarga yang mendukung pencapaian program Peningkatan Kualitas Keluarga, namun belum seluruhnya terstandarisasi.
- Sebanyak 14 kab/kota atau sebesar 58,33 persen telah menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi yang mendukung pencapaian Program Perlindungan Khusus Anak.
- Tahun 2024 sebanyak 24 Kab/Kota telah memenuhi 24 indikator KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) yang ditahun sebelumnya masih 22 kabupan/kota yang mendapat predikat KLA, namun dalam proses verifikasi administrasi KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak), 24 kabupaten/kota telah masuk kategori KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) dengan persentase capaian KLA (Kabupaten Layak Anak) sebesar 100 persen.
- Pelayanan dan pendampingan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT.PPA yang meliputi : UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan berbagi kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, seperti asesmen kasus, penjnagkauan korban, pemeriksaan psikologis, pendampingan hukum, layanan rumah aman, pendampingan Kesehatan, pemulangan korban, rehabilitasi sosial, dan layanan lain sesuai kebutuhan korban. Adapun kegiatan terkait yaitu penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi yang terdiri dari rincian kegiatan :
 1. UPT PPA Prov. Sulsel menyediakan layanan pengaduan Masyarakat bagi korban kekerasan Perempuan dan anak. Pendamping UPT PPA melakukan asesmen terhadap korban untuk mengetahui kebutuhan klien dan merumuskan langkah penanganan lanjutan.



2. UPT PPA Prov. Sulsel melakukan Penjangkauan terhadap Korban kekerasan Perempuan dan anak yang tidak dapat melakukan pengaduan secara langsung di kantor UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk melihat secara langsung lingkungan tempat tinggal korban.



3. Dalam penanganan kasus kekerasan Perempuan dan anak, pendamping UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa menginformasikan hak-hak korban, terutama dalam proses hukum.



4. UPT PPA Prov. Sulsel memberikan layanan pendampingan bagi korban Perempuan dan anak yang membutuhkan layanan Kesehatan berupa pendampingan visum, pendampingan persalinan, dan layanan Kesehatan lainnya sesuai kebutuhan korban.



5. UPT PPA Prov. Sulsel memfasilitasi layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan Perempuan dan anak sebagai Upaya pemulihan bagi korban pasca trauma atas kekerasan yang dialami.



6. UPT. PPA Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 juga melakukan tugas dan fungsinya dalam hal Fasilitasi pelayanan pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial. Hingga pendampingan, pemulangan dan reintegrasi social terhadap korban kekerasan.



7. Penyediaan layanan hukum bagi korban kekerasan berupa fasilitasi konsultasi hukum terhadap korban dan melakukan pendampingan dalam proses hukum yang dijalani oleh korban hingga ke proses persidangan. Dalam pendampingan tersebut, UPT PPA Prov. Sulsel berkoordinasi dengan

aparatus penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. UPT PPA Prov. Sulsel menyediakan layanan penampungan sementara atau rumah aman bagi korban yang teridentifikasi membutuhkan perlindungan sementara untuk memastikan keamanan korban dan keluarga korban.



9. Bagi korban kekerasan Perempuan dan anak penyandang disabilitas, UPT PPA Prov. Sulsel memfasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas dengan menyediakan penerjemah dan/atau pendamping sesuai kondisi disabilitas korban.



10. Dalam pelaksanaan layanan, UPT PPA Prov. Sulsel berjejaring dengan menyelenggarakan Kerjasama dengan berbagai Lembaga untuk mempermudah Koordinasi dalam rangka pemenuhan hak korban yang terdiri atas koordinasi terkait kasus kekerasan.

- Kordinasi terkait kasus kekerasan seksual Viral dengan UPTD PPA Kota Makassar



- Koordinasi terkait kasus persetubuhan anak dengan UPTD PPA Kabupaten Bulukumba



11. Selain memberikan pendampingan, UPT PPA Prov. Sulsel juga memberikan bantuan spesifik kepada korban kekerasan Perempuan dan anak yang berupa *dignity kit*, pakaian, dan kebutuhan pokok.



- Penguatan Kapasitas Guru/pengajar tentang mekanisme alur layanan pencegahan kekerasan di sekolah termasuk perkawinan anak. Selain melakukan sosialisasi ke sekolah kepada siswa-siswi juga dilakukan penguatan kapasitas guru untuk memperkuat mekanisme dan alur layanan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah termasuk perkawinan anak.



- Sebagai upaya penurunan angka perkawinan anak, tahun 2024 DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan melakukan fasilitasi bimbingan teknis Konvensi Hak Anak di Kabupaten Toraja Utara dan Parepare



- Sebagai upaya penguatan kebijakan dan kelembagaan terkait pencegahan perkawinan anak telah disusun draft Stratregi daerah pencegahan perkawinan anak sulsel 2024 – 2026. Hingga akhir tahun 2024, telah terbentuk 7 strada di daerah yaitu : Kota Makassar, Luwu Utara, Selayar, Barru, Gowa, Bone, Wajo.



- Telah dilakukan Lokakarya dalam menguatkan Pengelolaan dan pemanfaatan system data perkawinan anak di sulsel. Dalam rangka membangun sistem data perkawinan anak yang tersebar di berbagai sektoral seperti di dinas kependudukan dan pencatatan sipil: data pernikahan usia di bawah 18 tahun muslim dan non muslim, Dinas Kesehatan: data ibu hamil di bawah 20 tahun, BPS: proporsi usia perkawinan di bawah 18 tahun, Dinas Pendidikan data anak yang dikeluarkan dari sekolah karena perkawinan anak, Pengadilan Agama: data dispensasi nikah, KUA data administrasi pencatatan nikah berdasarkan usia di bawah 18 tahun. Pertemuan ini membahas jika data yang tersebar ini, adalah data yang dapat menggambarkan situasi perkawinan anak di Sulawesi Selatan.



- Sosialisasi Perkawinan anak berbasis Sekolah : Bersama PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi perkawinan anak ke beberapa sekolah, yaitu sekolah SMA 1 Makassar, SMA 14 Makassar, SMA 3 Maros dan beberapa pertemuan berbasis sekolah lainnya.



- Penguatan Kelembagaan untuk Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di Daerah. Selain memberikan layanan edukasi pengasuhan dan konsultasi, puspaga juga aktif melakukan penguatan kepada Puspaga yang ada di Kabupaten Kota dalam rangka memaksimalkan pelayanan Puspaga.



- PUSPAGA Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyediaan layanan konsultasi keluarga untuk mendukung tercapainya keluarga yang setara dan berbasis hak anak melalui konseling dan psikoedukasi keluarga. PUSPAGA juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan khususnya di keluarga. Dalam rangka meningkatkan akses layanan kepada masyarakat, maka DP3ADALDUK KB juga membuka akses kepada masyarakat yang ingin melakukan konseling secara *online*.



- Dilakukan rapat koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta peningkatan kapasitas relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak).



- Rapat-rapat koordinasi terkait pendataan perkawinan dan anak dengan lembaga terkait (UNICEF, Yayasan Bakti dan YASMIB) sebagai upaya penurunan angka perkawinan anak
- Pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada UPT.PPA Provinsi Sulawesi Selatan
- Dalam rangka pemenuhan hak anak, telah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di 24 Kabupaten/Kota
- Penguatan Provinsi Sulawesi Selatan menuju Provinsi Layak Anak melalui pendampingan serta bimbingan teknis pelaksanaan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) di 24 Kabupaten/Kota



- Penguatan peran forum anak melalui rapat program kerja forum anak se-Sulawesi Selatan periode tahun 2024-2025
- Kegiatan penguatan forum anak sebagai agen pelopor dan pelapor melalui pelaksanaan duta anak dan festival forum anak. DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memfasilitasi serangkaian kegiatan forum anak se-Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai agen pelopor dan pelapor kekerasan terhadap anak. Peran dan dukungan teman sebaya dalam pencegahan perkawinan anak tentunya sangat di butuhkan, untuk itu Forum Anak menjadi wadah dalam menjadi agen untuk pencegahan perkawinan anak di level sekolah dan lingkungan pergaulan teman sebaya.



3

Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)

Sasaran strategis DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung urusan pengendalian penduduk dan KB adalah menurunnya rata-rata angka kelahiran total dengan indikator keberhasilan sasaran berdasarkan nilai TFR (*Total Fertility Rate*) dan ASFR (*Age Specific Fertility Rate*). Pengendalian angka kelahiran total diharapkan mampu mengalami tren penurunan untuk mendukung terciptanya struktur kependudukan yang diinginkan. Sasaran ini juga didukung oleh

BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga memiliki komitmen dalam menciptakan struktur kependudukan yang ideal. Melalui sasaran ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 program untuk mendukung pencapaian target tersebut, yang terdiri dari Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, dan Program Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Untuk pencapaian kinerja sasaran menurunnya angka kelahiran total (TFR) adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.2.15
Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,65	2,15	118,87	ST
ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	30/1000 Kelahiran Hidup	26,2/1000 Kelahiran Hidup	112	ST

(Sumber : BKKBN)

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi di atas, dapat dilihat bahwa realisasi nilai TFR (*Total Fertility Rate*) tahun 2024 sebesar 2,15. Capaian realisasinya melebihi target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan di tahun 2024 yaitu 2,65. Sehingga berdasarkan data capaian tersebut, nilai TFR (*Total Fertility Rate*) tahun 2024 dikategorikan ST (Sangat Tinggi). Sedangkan nilai ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) juga lebih baik daripada target sebesar 26,4/1000 Kelahiran Hidup dengan kategori ST.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

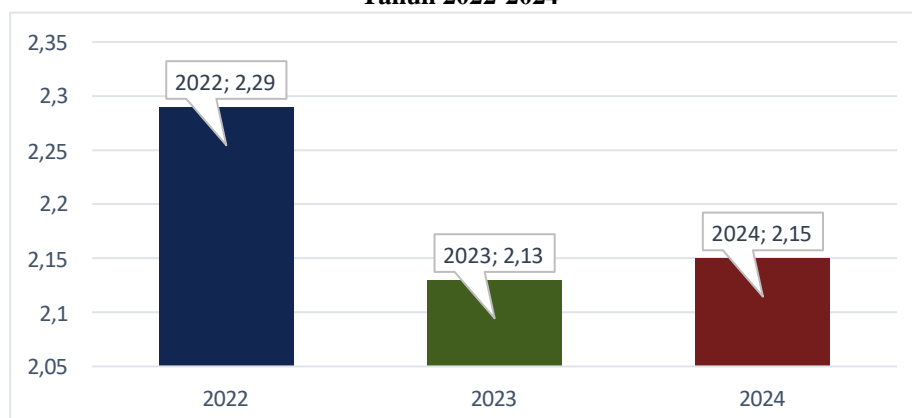
Tabel 3.2.16
Perbandingan Realisasi 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2022	2023	2024
1.	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,22	2,13	2,15
2.	ASFR (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	27,4/1000 Kelahiran Hidup	24,4/1000 Kelahiran Hidup	26,2/1000 Kelahiran Hidup

(Sumber : BKKBN 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren nilai TFR (*Total Fertility Rate*) dari tahun 2022 hingga 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan secara konsisten dan cukup signifikan, namun nilai TFR (*Total Fertility Rate*) kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 2,15. Begitu pula dengan nilai ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) yang menunjukkan tren penurunan kurun waktu 2022-2023 namun meningkat di tahun 2024 di angka 26,2/1000 Kelahiran Hidup. Hal ini berarti bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan upaya yang lebih melalui program/kegiatan terkait untuk menekan angka kelahiran.

Grafik. 3.2.6
Capaian TFR (*Total Fertility Rate*) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2024



(Sumber : BKKBN, 2024)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

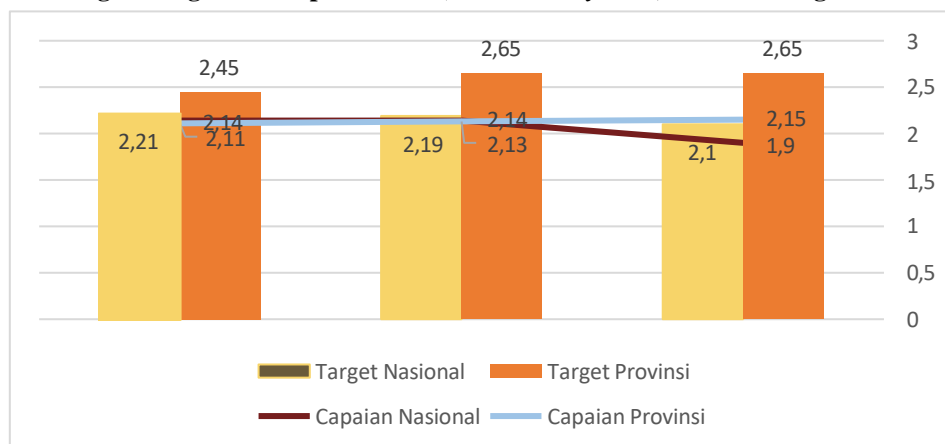
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target 2025	Target Akhir	Capaian s/d 2024 Terhadap Target 2026
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)			
1.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,65	2,15	118,87	2,64	2,45	118,87

2.	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	30/1000 Kelahiran Hidup	26,2/1000 Kelahiran Hidup	112,6	28/1000 Kelahiran Hidup	24/1000 Kelahiran Hidup	112,6
----	------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------	-------------------------	-------------------------	-------

(Sumber : Renstra 2024-2026 Dinas PPPA Dalduk KB Prov. Sulsel)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi nilai TFR (*Total Fertility Rate*) dan ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) Provinsi Sulawesi Selatan telah melebihi target yang termuat pada dokumen renstra (rencana strategis) tahun 2024-2026. Sehingga untuk tahun 2025 akan dilakukan perbaikan dan revisi terhadap target yang mendukung sasaran menurunnya angka total kelahiran terhadap kedua indikator tersebut yang didasarkan pada capaian tahun 2024.

Grafik 3.2.7
Perbandingan Target dan Capaian TFR (*Total Fertility Rate*) Provinsi dengan Nasional



Sumber : BKKBN

Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimal. RPJMN Indonesia tahun 2020-2024 menargetkan adanya penurunan TFR hingga mencapai 2,1 anak per perempuan pada tahun 2024. Angka tersebut dianggap ideal karena merupakan angka yang menunjukkan terjadinya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Berdasarkan grafik capaian Target TFR Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan yang signifikan, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2022-2024) capaian TFR (*Total Fertlity Rate*) Provinsi yaitu 2,11 (2022), 2,13 (2023) dan 2,15 (2024). Grafik diatas juga menunjukkan bahwa Capaian TFR Provinsi sangat mendekati capaian TFR Nasional. Kondisi TFR ini diharapkan dapat mendukung PTS di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mencapai PTS, kondisi ini diharapkan dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang agar dapat memperpanjang atau mempertahankan periode bonus demografi yang saat ini terjadi di Sulawesi Selatan. Setelah mencapai TFR di angka 2,15 maka fokus pembangunan kependudukan kedepannya bukan lagi pada penurunan TFR, melainkan ke arah peningkatan kualitas penduduk di Sulawesi Selatan.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan

- Untuk pencapaian TFR (*Total Fertlity Rate*) tahun 2024 sebesar 2,15. Oleh karenanya, untuk menurunkan TFR Sulawesi Selatan ke arah Target Nasional, maka Dinas PPPA Dalduk KB

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam hal ini menerbitkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk lebih optimal melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas. Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pembinaan ke kab/kota untuk menyusun GDPK dalam rangka sinkronisasi kebijakan kependudukan di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penurunan TFR sesuai target nasional.

- Konsistensi pelaksanaan advokasi KIE serta program bangga kencana sudah menjangkau level keluarga pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan pembinaan sampai level kader namun tahun ini lebih diperluas ke level keluarga.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan target sasaran menurunnya angka total kelahiran, terdapat 3 program yang mendukung pencapaian kinerja tersebut yang terdiri dari : 1). Program Pengendalian Penduduk dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 263.135.500 dengan realisasi sebanyak Rp. 279.751.200 atau 98,80 persen. 2). Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan jumlah anggaran Rp. 30.589.700 dengan realisasi sebanyak Rp. 27.429.700 atau 89,67 persen dan 3). Program Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sejumlah Rp. 1.276.616.000 dengan realisasi sebanyak Rp. 1.157.707.210 atau 90,69 persen. Sehingga persentase efisiensi sumber daya untuk ketiga program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 93,09 persen.

Tabel 3.2.18
Analisis Efisiensi Sumber Daya

No.	Program	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 283.135.500	Rp. 279.751.200	98,80
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 30.589.700	Rp. 27.429.700	89,67
3.	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Rp. 1.276.616.000	Rp. 1.157.707.210	90,69
Jumlah		Rp. 1.590.341.200	Rp. 1.464.888.110	93,09

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran program yang mendukung sasaran tersebut. Sasaran kinerja dinas (3) yaitu Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Penduduk (TFR/*Total Fertility Rate*) didukung oleh 3 program seperti yang termuat dalam tabel di bawah ini. Adapun perhitungan tingkat efisiensinya sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja Sasaran (3)} - \text{Capaian RA Program}}{\text{Capaian RA Program}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{115,43 - 93,09}{93,09} \times 100\% = 23,99\%$$

Tabel 3.2.19
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	Program Mendukung Sasaran	%Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	Nilai TFR (Total Fertility Rate)	118,87	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana • Program Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 	93,09	23,99%
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	112			

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa aspek yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran ketiga adalah dilaksanakan sinergitas program dan kegiatan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, antara lain:

- 1) Untuk pencapaian program pembinaan keluarga berencana, peserta PUS KB aktif sebesar 65,34 persen. Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan isu kependudukan di kampung KB sebesar 25 persen dan persentase kab/kota yang meningkat Indeks Capaian Pembangunan Keluarga sebesar 25 persen..
- 2) Tersosialisasikannya Buku Profil Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengundang Perangkat Daerah KB tingkat kabupaten/kota dan Dinas Dukcapil 24 kab/kota, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otda, BKAD, Inspektorat Daerah, serta Rumah Sakit dibawah naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, TP PKK, serta instansi vertikal meliputi BKKBN, BPS, dan organisasi kemasyarakatan PKBI, koalisi kependudukan.



- 3) Tersusunnya Buku Panduan Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal dengan tim penyusun melibatkan dari berbagai sektor antara lain lingkup Pemprov Sulsel yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, akademisi yaitu FKM UNHAS, instansi vertikal seperti BKKBN, Kemenag, organisasi kemasyarakatan PKBI, PERSAGI, PERSAKMI.



- 4) Terlaksananya kegiatan rembuk stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, rapat koordinasi Aplikasi InZting Provinsi Sulawesi Selatan, Rapat Evaluasi TPPS Semester I Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari tupoksi DP3ADALDUK KB selaku sekretariat TPPS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat dengan mengundang OPD lingkup pemprov serta mitra kerja di tingkat Kabupaten/Kota. Tidak ada pelaksanaan fasilitasi pembimbingan, pengembangan, penyiapan pengasuhan 1000 HPK di tahun 2024 karena seluruh anggaran di DPA tersebut diarahkan untuk operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat TPPS.
- 5) Terlaksananya kegiatan rembuk stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Rapat Koordinasi Aplikasi InZting Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Rapat Evaluasi TPPS Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2024.



Sasaran urusan kinerja rutin yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Keuangan Perangkat Daerah mendukung sasaran 1 yang termuat dalam dokumen RPD Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah. Berikut pencapaian kinerja berdasarkan sasaran tersebut.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.2.20
Perbandingan Target Dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi 2023/2024	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (100)	82,15	82,15	T

Sumber : Inspektorat Prov. Sulsel

Merujuk pada tabel perbandingan target dan realisasi di atas, menunjukkan nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023/2024 DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai A dengan konversi nilai sebesar 82,15 poin dengan kategori memuaskan dimana hasil tersebut menunjukkan adanya sedikit kenaikan sebesar 0,9 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.2.21
Komponen Penilaian SAKIP

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023/2024
A.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
B.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
C.	Pelaporan Kinerja	15	14,10
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
	Jumlah	100	82,15

Sumber : Penilaian LHP Inspektorat Prov. Sulsel

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2.22
Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,15)	A (81,25)	A (82,15)

(Sumber : Penilaian LHE Inspektorat Prov. Sulsel 2023/2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk nilai SAKIP Perangkat Daerah dari tahun 2021/2022 hingga 2023/2024 mengalami peningkatan namun belum signifikan. Terdapat beberapa

rekomendasi yang menjadi catatan dalam Laporan Hasil Evaluasi DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi oleh Inspektorat yaitu :

Tabel 3.2.23
Hasil Evaluasi SAKIP DP3A DALDUK KB Provinsi Sulsel 2023/2024

No.	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Menyajikan secara dirinci faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target program/kegiatan
		Memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi rencana aksi
2.	Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Pengukuran kinerja untuk rencana aksi digunakan untuk pengendalian kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja perlu menyajikan informasi terkait realisasi data nasional/int\ernasional (<i>benchmarking</i>)
		Menyajikan secara rinci informasi tentang pencapaian kinerja, kendala dan hambatan dalam Laporan Kinerja

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023/2024, Inspektorat

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023/2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.2.24
Perbandingan target tahun 2024, RPJMD, dan Nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Target		
		Tahun 2023/2024	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Nilai Sakip OPD	A (82,15)	A	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran untuk nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki target RPJMD yaitu A dimana kontribusi nilai sakip setiap Perangkat Daerah Provinsi secara rata-rata diupayakan mencapai target akhir RPJMD tersebut.

d. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja :

- Konsistensi antar dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKPD), dokumen pelaksana anggaran, pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja telah disusun dengan baik dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya.
- Perbaikan pelaksanaan evaluasi renja dilaksanakan per triwulan.
- Administrasi keuangan laporan pertanggungjawaban tersusun dengan baik.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah :

- Pemantauan rencana aksi masih belum dilakukan secara berkala
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum dituangkan ke dalam laporan hasil evaluasi triwulan yang memuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang mendalam.
- Evaluasi internal masih belum sepenuhnya memberikan gambaran atas permasalahan dan rekomendasi perbaikan kinerja.

Upaya/Rekomendasi yang dilakukan :

- Pemantauan rencana aksi dilakukan secara berkala
- Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi triwulan yang memuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang mendalam.
- Melakukan evaluasi internal yang mampu menggambarkan permasalahan dan rekomendasi kinerja.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dengan target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, penganggaran dan keuangan PD tahun 2024 dimana program yang mendukung sasaran tersebut adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 12.148.748.785 dengan realisasi sebanyak Rp. 11.575.534.065 atau 95,28 persen.

Tabel 3.2.25
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.148.748.785	Rp. 11.575.534.065	95,28
	Jumlah	Rp. 12.148.748.785	Rp. 11.575.534.065	95,28

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sulsel membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran program yang mendukung sasaran tersebut. Sasaran kinerja rutin dinas yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah. Adapun perhitungan tingkat efisiensinya sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja Sasaran} - \text{Capaian RA Program}}{\text{Capaian RA Program}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{82,15 - 95,28}{95,28} \times 100\% = -13,78\%$$

Tabel 3.2.26
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	Program Mendukung Sasaran	%Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	82,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,28	-13,78%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa aspek yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran empat adalah Dinas PPPA Dalduk KB :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan PD dengan tersusunnya dokumen perencanaan, dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran, terlaksananya forum perangkat daerah serta dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya.
- Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan dibayarkannya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun (12 bulan), tersusunnya laporan keuangan semester dan akhir tahun serta tersusunnya laporan administrasi keuangan.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan tersusunnya laporan administrasi kepegawaian
- Administrasi umum Perangkat Daerah dengan tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor, perlengkapan dan peralatan gedung kantor, barang cetakan dan penggandaan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar unit DP3A Dalduk KB, Sistem Berbasis Elektronik yang dimanfaatkan.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tersedianya surat masuk dan surat keluar, terbayarkannya tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun, dipeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor, serta terbayarkannya gaji non pns dan *outsourcing*.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbayarkannya pajak kendaraan roda 2 dan 4 serta dipeliharanya kendaraan dinas dan gedung kantor.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Adapun realisasi belanja berdasarkan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	
			KEUANGAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	16.919.177.905,00	16.028.708.369,00	94,74
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.148.749.485,00	11.575.534.065,00	95,28
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.159.600,00	195.488.081,00	88,79
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.639.700,00	107.290.603,00	87,48
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.234.600,00	4.234.600,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.306.000,00	3.444.500,00	79,99
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.511.100,00	15.088.100,00	97,27
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.264.100,00	7.264.100,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.931.200,00	44.893.278,00	84,81
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.272.900,00	13.272.900,00	100,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.337.191.076,00	9.191.439.405,00	98,44
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.258.660.776,00	9.118.821.505,00	98,49
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.800,00	19.999.800,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	52.780.700,00	46.868.300,00	88,80
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.749.800,00	5.749.800,00	100,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.690.000,00	4.690.000,00	100,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.690.000,00	4.690.000,00	100,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.993.700,00	531.280.734,00	67,59
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.233.100,00	12.233.100,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.805.000,00	25.000.000,00	21,59
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.081.200,00	33.276.200,00	89,74
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.950.600,00	48.944.900,00	99,99

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.309.600,00	253.366.971,00	64,91
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.274.200,00	6.274.200,00	100,00
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	175.340.000,00	152.185.363,00	86,79
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.802.056,00	1.036.083.497,00	95,60
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.897.800,00	29.897.800,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.630.400,00	80.833.275,00	68,14
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.470.000,00	66.465.000,00	98,51
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.803.856,00	858.887.422,00	98,97
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.913.053,00	616.552.348,00	86,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	536.603.228,00	458.421.700,00	85,43
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.309.825,00	158.130.648,00	87,70
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	520.190.900,00	473.299.900,00	90,99
VII	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	49.968.700,00	46.068.700,00	92,20
1	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	29.082.200,00	27.482.200,00	94,50
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	6.405.300,00	6.405.300,00	100,00
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	14.481.200,00	12.181.200,00	84,12
VIII	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	470.222.200,00	427.231.200,00	90,86
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	470.222.200,00	427.231.200,00	90,86
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.071.970.140,00	988.301.703,00	92,19
IX	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.083.700,00	120.912.700,00	96,67

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	101.668.000,00	100068000,00	98,43
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	23.415.700,00	20.844.700,00	89,02
X	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	916.721.640,00	844.549.335,00	92,13
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	673.489.640,00	634.223.968,00	94,17
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.232.000,00	210.325.367,00	86,47
XI	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30.164.800,00	22.839.668,00	75,72
1	Advokasi Lebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30.164.800,00	22.839.668,00	75,72
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	841.557.280,00	834.494.280,00	99,16
XII	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	656.517.680,00	653.114.180,00	99,48
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	656.517.680,00	653.114.180,00	99,48
XII I	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	185.039.600,00	181.380.100,00	98,02
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	185.039.600,00	181.380.100,00	98,02
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	76.518.000,00	47.471.330,00	62,04

XIV	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	76.518.000,00	47.471.330,00	62,04
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	53.388.000,00	36.579.130,00	68,52
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	23.130.000,00	10.892.200,00	47,09
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	556.644.500,00	541.098.927,00	97,21
XV	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	178.054.500,00	167.769.860,00	94,22
1	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	178.054.500,00	167.769.860,00	94,22
XVI	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	378.590.000,00	373.329.067,00	98,61
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	15.499.000,00	13.370.075,00	86,26
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsidan intas Daerah Kab/Kota	363.091.000,00	359.958.992,00	99,14
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	113.206.400,00	103.620.054,00	91,53
XVI I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	28.169.400,00	26.181.054,00	92,94
1	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	28.169.400,00	26.181.054,00	92,94
XVI II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	16.013.000,00	14.863.000,00	92,82
1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	16.013.000,00	14.863.000,00	92,82
XIX	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	69.024.000,00	62.576.000,00	90,66

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	69.024.000,00	62.576.000,00	90,66
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	283.135.500,00	279.751.200,00	98,80
XX	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	179.106.300,00	177.529.800,00	99,12
1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	179.106.300,00	177.529.800,00	99,12
XXI	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	104.029.200,00	102.221.400,00	98,26
1	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga, Berencana (Bangga Kencana))Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	104.029.200,00	102.221.400,00	98,26
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	30.589.700,00	27.429.700,00	89,67
XXI I	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	30.589.700,00	27.429.700,00	89,67
1	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	30.460.600,00	27.300.600,00	89,63
2	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	129.100,00	129100,00	100,00
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.276.616.000,00	1.157.707.210,00	90,69
XXI II	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pebinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.259.159.500,00	1.146.256.544,00	91,03
1	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.891.800,00	1.891.800,00	100,00

2	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1.257.267.700,00	1.144.364.744,00	91,02
XXI V	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	17.456.500,00	11.450.666,00	65,60
1	Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	17.456.500,00	11.450.666,00	65,60

3.4 HASIL TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP 2023/2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023/2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700.04/2625/A.1/ltprov tanggal 30 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023/2024, maka berikut hasil tindak lanjut terkait evaluasi SAKIP 2023/2024 inas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel 3.4.1
Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2023/2024

No.	Komponen	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2023/2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP 2022/2023
A.	Perencanaan Kinerja	Menyajikan secara rinci faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target program/kegiatan	Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang menyajikan faktor penyebab tidak tercapai/terpenuhinya di program/kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen laporan renja
		Memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi rencana aksi	Menyajikan informasi terkait permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut dalam dokumen monev rencana aksi
		Laporan rencana aksi belum sepenuhnya memuat permasalahan dan rencana tindak lanjut	Menyajikan informasi terkait permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut dalam dokumen monev rencana aksi
B.	Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Menyusun dokumen SK pemberdian reward dan punishment lingkup DP3A Dalduk KB
		Pengukuran kinerja untuk rencana aksi digunakan untuk pengendalian kinerja	Menyusun dokumen pengukuran kinerja
C.	Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja perlu menyajikan informasi terkait realisasi data nasional/int\ernasional (<i>benchmarking</i>)	Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan realisasi terhadap indikator yang memiliki capaian nasional sehingga dapat diperbandingkan
		Menyajikan secara rinci informasi tentang pencapaian kinerja, kendala dan hambatan dalam Laporan Kinerja	Memuat secara rinci terkait pencapaian kinerja, kendala dan hambatan yang dihadapi yang termuat dalam bab III dan bab IV laporan kinerja

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan dokumen renstra tahun 2024-2026 yang merujuk pada Rencana Pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Laporan kinerja tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban tertulis atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun simpulan capaian kinerja setiap sasaran strategis yang diampuh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	100,63	ST
2.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	104,09	ST
3.	Menurunnya rata-rata angka kelahiran total (<i>TFR/Total Fertility Rate</i>)	115,43	ST
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Perangkat Daerah	82,15	T

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Capaian Kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami progses yang cukup singnifikan selama 2 tahun terakhir yakni predikat A tahun 2022/2023 menjadi A dengan nilai 81,25 naik 0,15 poin dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023/2024, masih dengan kategori A dengan nilai konversi 82,15.

Adapun langkah-langkah peningkatan kinerja di masa yang akan datang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah dan *Stakeholder*/Mitra/Lembaga lainnya baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun lembaga terkait untuk memperkuat layanan terkait perlindungan perempuan dan anak.
2. Memaksimalkan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) tingkat Perangkat Daerah maupun kab/kota dalam penguatan regulasi Pengarusutaman Gender di daerah.

3. Memperkuat advokasi, sosialisasi dan menstandarisasi lembaga layanan Pemberdayaan Perempuan, UPT.PPA tingkat kabupaten/kota.
4. Memperkuat advokasi, sosialisasi dan koordinasi terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan keluarga sejahtera dalam mendukung sasaran *Total Fertility Rate*.
5. Mengoptimalkan pemantauan *monitoring* dan evaluasi capaian hasil kinerja secara triwulan dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
6. Melakukan review rutin melalui kegiatan rapat internal terhadap pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

4.3 Rekomendasi/Saran

Berdasarkan data pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, diperlukan beberapa rekomendasi/saran untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang :

1. Untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, diperlukan adanya pendampingan yang lebih holistik integratif terhadap kab/kota serta Perangkat Daerah Provinsi untuk memenuhi indikator 3 prasyarat PUG (Pengarusutamaan Gender) dengan mengintegrasikan gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta melakukan standarisasi LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk pencapaian sasaran menurunnya kekerasan terhadap anak, memaksimalkan cakupan penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO, standarisasi lembaga perlindungan perempuan dan anak, kerjasama lintas sektor dan lembaga serta memaksimalkan peran PUSPAGA dan UPT. PPA Provinsi.
3. Untuk pencapaian sasaran menurunnya angka total kelahiran penduduk, salah satu upaya untuk menurunkan angka TFR (*Total Fertility Rate*) adalah dengan mengupayakan penurunan angka perkawinan dini.. Tidak hanya kelahiran, tapi mulai dari merencanakan pendidikan, kesempatan bekerja, baru merencanakan keluarga serta bimbingan mengenai kesehatan reproduksi remaja.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui review terhadap pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat memanfaatkan hasil review tersebut sebagai dasar dalam pengukuran pencapaian kinerja hingga level sasaran.

Demikian Laporan Kinerja tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Makassar, 27 Februari 2025

Kepala Dinas,



Hj. Andi Mirna, SH.

Pangkat Pembina Utama Madya

Nip. 19671006 199301 2 002